

**PENGARUH ASSET INTENSITY DAN DEBT POLICY
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG BERGERAK DI BIDANG PERTAMBANGAN
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIDOE 2011-2020**

Ade Ponirah

Magister Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

adeponirah@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are a source of cash income for the state. Taxes are levied on taxpayers with applicable provisions. One of the largest contributors of tax receipts is from corporate taxpayers. Tax avoidance is part of an active effort to fight taxes, all actions taken directly to avoid taxes. Asset intensity is a long-term asset and this asset is operational support of the company and will not be sold. A debt policy is a policy determined by the company to meet the needs of funds derived from debt. This research uses descriptive methods and quantitative approaches using secondary data supported by literature and documentation studies. The results showed that partial asset intensity had no significant effect on tax avoidance. Similarly, debt policy has no significant effect on tax avoidance. Simultaneously asset intensity and debt policy have an insignificant effect on tax avoidance with a contribution of 22%.

Keywords: *Asset Intensity, Debt Policy, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pemasukan kas bagi negara. Pajak di pungut kepada wajib pajak dengan ketentuan yang berlaku. Pendukung penerimaan pajak terbesar dari Wajib Pajak Badan atau perusahaan. *Tax avoidance* penting untuk upaya pertempuran penilaian secara aktif, semua kegiatan dibawa langsung ke spesialisasi tugas untuk menghindari biaya. *Asset intensity* merupakan aset yang bersifat jangka panjang dan aset ini sebagai penunjang operasional perusahaan serta tidak akan dijual. *Debt policy* adalah kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari utang. Penelitian ini menggunakan teknik yang jelas dan metodologi kuantitatif yang menggunakan informasi tambahan yang didukung oleh tulisan dan pertimbangan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak mampu dipengaruhi secara besar oleh *asset intensity*. Selain itu, *tax avoidance* juga tidak mampu dipengaruhi oleh *debt policy* dengan signifikan. Pada saat yang sama, *asset intensity* dan *debt policy* tidak berdampak besar pada *tax avoidance* dengan kontribusi sebesar 22%.

Kata Kunci: *Asset Intensity, Debt Policy, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Unsur penting dalam penerimaan dan pembiayaan negara ialah berasal dari pajak. Pajak adalah komitmen yang harus dibayar oleh wajib pajak yang nantinya menjadi kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Negara lebih mengharapkan pendapatan dari penerimaan pajak, setiap tahun penerimaan pajak selalu meningkat menjadi sinyal baik untuk negara karena penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dalam negeri.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan merupakan perwujudan peran serta masyarakat secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pengembangan nasional. Pajak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan daya beli masyarakat (Mulyani et al., 2014).

Terdapat dua persepsi mengenai pajak, dari sudut pandang pemerintah menginginkan penerimaan pajak harus maksimal karena akan digunakan untuk pembiayaan Negara. Namun dari sudut pandangan masyarakat menginginkan pemungutan pajak dengan seminimal mungkin karena pembayaran pajak ini akan mengurangi laba yang didapatkan terlebih sebuah perusahaan. Dari beberapa objek pajak, penyumbang penerimaan pajak terbesar salah satunya Wajib Pajak Badan (perusahaan). Perusahaan menjadi peran penting dalam penerimaan pajak karena mampu membantu terbentuknya struktur perekonomian kearah yang lebih baik. Selain

menyerap pengangguran perusahaan juga memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam negeri maupun luar negeri (Moeljono, 2020).

Kewajiban membayar pajak dapat menurunkan tingkat laba. Kondisi ini menimbulkan konflik antara negara dengan perusahaan karena memiliki kepentingan yang berbeda. Negara beranggapan bahwa kewajiban perusahaan membayar pajak adalah sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan. Namun dari sisi perusahaan pengenaan pajak ini dapat menurunkan laba, karena pada dasarnya tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Oleh sebab itu, perusahaan mencari berbagai upaya agar dapat mengurangi jumlah pembayaran, baik dengan metode benar ataupun menyeleweng (Waluyo et al., 2015).

Tindakan yang dilakukan untuk penghindaran pajak yaitu *tax avoidance* bagian dari *tax planning*, cara ini legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Pohan, 2013). *Tax avoidance* merupakan bagian dari upaya anti pajak yang kuat, semua tindakan diambil langsung di fiskus untuk menghindari pembayaran pajak. Metode yang digunakan adalah mencari kekurangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan guna menemukan celah untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). Ukuran penghindaran pajak dapat diperkirakan dengan membandingkan uang tunai yang dihabiskan untuk belanja dan laba yang belum kena pajak (Dyreng, 2010).

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya *tax avoidance* salah satunya ialah *asset intensity* dan *debt policy*. Aset tetap merupakan aset yang bersifat

jangka panjang dan aset ini sebagai penunjang operasional perusahaan serta tidak akan dijual. Pengelompokan aset ini akan mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang ditanggung perusahaan (Jama & Harnovinsah, 2018). Maka perusahaan berupaya untuk memperkecil pembayaran pajak dengan cara legal maupun illegal, memanfaatkan kelemahan peraturan pajak sehingga dapat target laba dapat tercapai. Karena wajib pajak badan salah satu kontribusi terbesar penerimaan pajak bagi negara (Darmawan & Sukartha, 2014).

Asset intensity merupakan proporsi pengelompokan aset tetap yang akan menambahkan beban penyusutan sebagai turunan dari pembayaran, setiap kali sumber daya tetap diperluas, manfaat selanjutnya akan berkurang karena biaya devaluasi yang tinggi. (Purwanti & Sugiarty, 2017). *Asset intensity* akan dapat mempengaruhi pembayaran pajak. Karena menggambarkan banyaknya investasi terhadap aset tetap. Alasan mengapa *asset intensity* menjadi pengurang pajak ialah karena aset tetap mengandung depresiasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Karena beban depresiasi akan mengurangi beban pajak. Adanya beban depresiasi ini akan menburangi laba, jika laba berkurang maka akan mengurangi pajak perusahaan tersebut (Mulyani et al., 2014). Seperti yang dijelaskan oleh Blocher bahwa Beban depresiasi memiliki pengaruh pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak (Blocher et al., 2007).

Bukti empiris mengenai pengaruh *Asset Intensity* ialah penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana bahwa *Asset Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Dharma & Ardiana, 2016). Selaras dengan penelitian yang dilakukan

oleh Darmadi dan Zulaikha menyatakan bahwa *Asset Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Darmadi & Zulaikha, 2013). Namun terapat juga bukti empiris yang bertolak belakang dengan asumsi penulis yaitu *asset intensity* tidak mampu mempengaruhi dengan signifikan terhadap *tax avoidance* sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilian dkk (Aprilia et al., 2020). Selaras dengan hasil temuan Ningsih dkk bahwa *asset intensity* tidak mampu mempengaruhi dengan signifikan terhadap *tax avoidance* (Ningsih et al., 2020).

Debt policy adalah kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari utang. Sumber dana ini termasuk dalam sumber dana eksternal (Rusli, 2019). Utang perusahaan mengandung bunga yang harus dibayar. Oleh karena itu, biaya bunga ini dapat mengurangi manfaat sebelum pajak, sehingga tarif pajak yang dibayarkan dapat dikurangi (Agustina & Aris, 2016). Utang dapat mengurangi pajak kaena mengandung bunga dan dapat mengurangi tingkat laba. Menurut Prabowo bunga pinjaman baik yang dibayar ataupun belum di bayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Dengan adanya biaya hutang maka perusahaan akan memilih hutang dalam pembiayaan (Prabowo, 2006).

Bukti empiris *debt policy* dapat menjadi pengurang pajak ialah penelitian yang dilakukan oleh Haryadi bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan beban bunga yang menjadi pengurang pajak (Haryadi, 2012). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Barli

bahwa *debt policy* mampu mempengaruhi *tax avoidance* (Barli, 2018).

Namun juga terdapat bukti empiris yang menyatakan bahwa *debt policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (Darmawan & Sukartha, 2014). Juga penelitian yang dilakukan oleh Noor dkk

bahwa *debt policy* tidak mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Noor et al., 2010).

Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan kategori pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Bukit Asam, Tbk periode 2011-2020, berikut data penelitian disajikan dalam bentuk table 1.

Tabel 1

**Data Asset Intensity, Debt Policy dan Tax Avoidance
pada PT. Bukit Asam, Tbk periode 2011-2020**

Periode	Asset Intensity	Debt Policy	Tax Aviofance
2011	23,01	29,00	23,92
2012	31,51	33,20	25,62
2013	44,51	35,30	24,66
2014	49,93	41,50	22,51
2015	55,02	45,02	23,53
2016	55,05	43,20	1,35
2017	49,44	37,24	0,55
2018	51,44	32,69	24,68
2019	55,25	29,41	25,93
2020	65,23	29,59	25,49

Sumber data: laporan keuangan tahunan PT. Bukit Asam, Tbk

Berdasarkan data yang diperoleh adanya ketidak sesuain dengan teori. Mkain tinggi *asset intensity* perusahaan maka semakin besar biaya amortisasi yang dikeluarkan sehingga mengurangi beban pajak penghasilan dalam rekonsiliasi keuangan. Selanjutnya Hutang dimiliki perusahaan akan menambah beban tetap perusahaan, yang nantinya beban ini akan mengurangi laba perusahaan, jika laba berkurang maka akan mengurangi pembayaran pajak. Namun berdasarkan tabel diatas terdapat data yang

tidak sesuai dengan teori. Pada tahun 2012, 2015 dan 2017 kedua variabel independen mengalami kenaikan namun diikuti oleh variabel depeen. Selanjutnya masalah lain ditemukan pada tahun 2019 *asset intensity* mengalami kenakan diikuti oleh *tax avoidance* yang ikut meningkat. Maka dari itu dengan adanya ketidaksesuaan antara teori dengan data menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Kajian Teori

Asset Intensity

Asset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan (Weygandt et al., 2007). Asset ini terbagi menjadi asset lancar dan aset tetap. Aset lancar memiliki umur ekonomis yang singkat sedangkan asset tetap memiliki umur ekonomis yang cukup lama. Asset tetap memiliki nilai paling besar dalam komponen neraca terutama pada industri manufaktur (Savitri, 2017). Menurut Subramanyan aset tetap ialah aset berwujud yang bersifat tidak lancar digunakan oleh perusahaan untuk proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode (Subramanyam, 2010).

Asset intensity merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan asset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total asset (Adhisamartha & Noviani, 2015). *Asset Intensity* menurut Mulyani proposi yang mana terdapat pos bagi perusahaan untuk menambah beban, yaitu beban penyusutan, yang berasal dari asset tetap sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Jika asset tetap tinggi maka akan menyebabkan penurunan laba karena disebabkan perusahaan harus menyiapkan dana untuk biaya penyusutan (Mulyani et al., 2014). Berdasarkan uraian di atas maka *asset intensity* dapat didefinisikan sebagai rasio yang mengukur sejauh mana asset tetap dapat mengurangi pajak.

Debt Policy

Debt policy merupakan kebijakan pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal. Penentuan kebijakan utang ini merupakan bagian dari struktur modal karena merupakan dari bagiannya. Jika perusahaan memiliki tingkat utang yang

tinggi maka dinilai tidak baik namun jika perusahaan tidak memiliki hutang diindikasikan perusahaan tersebut tidak dapat memanfaatkan hutangnya untuk meningkatkan operasional perusahaan (Hanafi, 2010). Harmono mendefinisikan *debt policy* merupakan keputusan mengenai pendanaan yang akan mempengaruhi terhadap harga saham perusahaan. Maka dari itu salah satu tugas manajemen keuangan ialah untuk menentukan sumber pendanaan yang sesuai karena akan mencerminkan harga saham perusahaan (Harmono, 2009).

Menurut Bambang Royanto, *debt policy* ialah sebuah keputusan perusahaan yang sangat penting untuk berjalannya perusahaan. Karena *debt policy* merupakan bagian dari pendanaan perusahaan. *Debt policy* merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan (Riyanto, 2008). Menurut teori *trade off* yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston perusahaan yang menukar manfaat pajak dari pendanaan hutang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan (Brigham & Houston, 2007).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak dengan metode alternatif melakukan rekayasa pajak namun masih dalam peraturan perpajakan yang ada (Lubis, 2010). *Tax avoidance* ini merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan hukum dan perundang-undangan pajak dengan metode tertentu (Zain, 2008).

Tax avoidance salah satu rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Mardiasmo dalam Prakosa, penghindaran pajak merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Pohak *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan pajak dimana metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan pajak

Metodologi

Pada penelitian ini menggunakan strategi deskriptif melalui metodologi kuantitatif yang menggambarkan informasi matematis, dan keterkaitan antar faktor melalui investigasi dengan menggunakan alat uji faktual. Informasi yang digunakan berasal dari ringkasan fiskal PT. Bukit Asam, Tbk periode 2011-2020 yang menjadi objek dalam penelitian ini di unduh dari website resmi perusahaan yaitu www.ptba.co.id

Tabel 2

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Skala
Asset Intensity	<i>Asset intensity</i> merupakan proporsi pengelompokan aset tetap yang akan menambahkan beban penyusutan sebagai turunan dari pembayaran.	Jumlah Aset Tetap Total Asset	$= \frac{\text{Jumlah Aset Tetap}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
Debt Policy	<i>Debt policy</i> adalah kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari utang.	Total Hutang Total Asset	$= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
Tax Avoidance	<i>Tax avoidance</i> merupakan bagian dari upaya anti pajak yang kuat, semua tindakan diambil langsung di fiskus untuk menghindari pembayaran pajak.	Jumlah Pajak Laba Sebelum Pajak	$= \frac{\text{Jumlah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mensurvei peredaran informasi dalam suatu pengumpulan informasi jika dilakukan secara teratur. Perhitungan ini menggunakan uji One-sample Kolmogorov Smirnov. Berikut adalah akibat dari estimasi dengan menggunakan SPSS

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.83273198
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.270
	Positive	.120
	Negative	-.270
Test Statistic		.270
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058 ^c

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS versi 22.0

Berdasarkan tabel diatas, nilai basis adalah 0,038. Oleh karena itu, sangat baik dapat dianggap bahwa penyelidikan ini dapat diprediksi dengan anggapan keteraturan dimana semua instrumen pemeriksaan memiliki informasi yang biasanya beredar, dengan alasan bahwa $0,058 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara *asset intensity*

dan *debt policy*. Pilihannya tergantung pada nilai torelansi > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
AI	.925	1.081
DP	.925	1.081

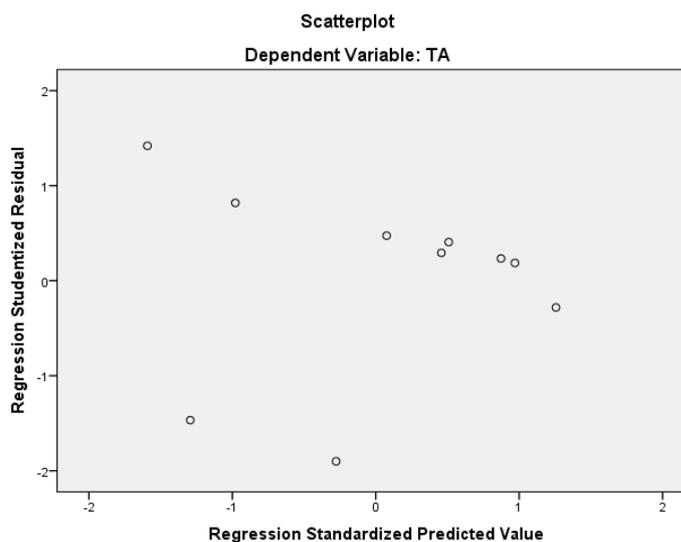
a. Dependent Variabel : *Tax Avoidance*

Sumber: Output SPSS versi 22.0

Berdasarkan pada hasil pengujian di atas, diperoleh hasil *asset intensity* dan *debt policy* untuk *tolerance* sebesar 0,925 > 0,01 dan nilai VIF sebesar 1,081 < 10. Maka dapat disimpulkan modal regresi ini tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi hubungan antarvariabel penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menunjukkan tidak terjadinya kesamaan jenis. Menggunakan diagram sebar untuk melihat apakah penelitian ini mengandung heterokedastisita. Mengacu pada grafik di bawah, diperoleh kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini terhindar dari heterokedastisitas karena data terdistribusi secara acak.



Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel penjelas terhadap variabel

dependen baik secara simultan. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48.814	21.745		2.245	.060
AI	-.032	.281	-.039	-.113	.913
DP	-.771	.586	-.457	-1.317	.229

a. Dependent Variabel: *Tax Avoidance*

Sumber: hasil *output* SPSS versi 22.0

Menyisinggung tabel di atas, model kondisi persamaan diperoleh:

$$\text{Tax Avoidance} = 26.220 - 0.133 \text{ Asset Intensity} - 0,771 \text{ Debt Policy}$$

Mengacu pada persamaan regresi berganda, hasilnya adalah nilai konstant (a) yaitu 48,814. Angka ini berarti bahwa nilai *aset intensity* dan *debt policy* adalah tetap atau konstan, maka *tax avoidance* akan bernilai 48,814.

Selain itu, variabel *debt policy* dengan nilai sebesar -0,771. Angka ini negatif, menyiratkan bahwa jika *debt policy* meningkat satu persen diharapkan faktor yang berbeda stabil, maka, pada saat itu *tax avoidance* akan berkurang sebesar 0,771.

Analisis Korelasi dan Determinasi

Berikutnya adalah pengujian korelasi dan determinasi yang telah dilakukan.

Tabel 5 Hasil Uji Korelasi dan Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.469 ^a	.220	-.003	10.01538

a. Predictors : (Constant), *Tax Avoidance*

Sumber: *output* SPSS versi 22.0

Menyinggung hasil pengujian di atas, menjelaskan kehebatan hubungan antara *asset intensity* dan *debt policy* terhadap *tax avoidance* sebesar 0,469 yang dikenang untuk klasifikasi sedang. Selanjutnya, konsekuensi R Square (r^2) sebesar 0.220 atau setara dengan 22%. Memiliki kepentingan di bawah *tax avoidance* dipengaruhi oleh *asset intensity* dan *debt policy* sebesar 22%, sisanya 78% dipengaruhi oleh elemen yang berbeda.

Uji Hipotesis

Uji t

Menyinggung konsekuensi dari uji regresi berganda di atas, nilai pengukuran t yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Efek samping dari uji t utama, khususnya dampak *asset intensity* terhadap *tax avoidance*, berdasarkan tabel, nilai uji-t adalah -0,113 dengan tingkat sig 0,913. Hasil ini

f adalah sebagai berikut:

menunjukkan bahwa penghargaan signifikan tidak memenuhi standar dampak karena lebih dari 0,05. Pada pengujian ini $0,913 > 0,05$, sehingga diperoleh bahwa terhadap *tax avoidance* tidak mampu dipengaruhi oleh *asset intensity*.

Efek lanjutan dari uji t berikutnya adalah dampak dari *debt policy* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel di atas, uji-t adalah -1,137 dengan tingkat signifikansi 0,229. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan tidak memenuhi aturan dampak karena lebih menonjol dari 0,05. Dalam pengujian $0,229 > 0,05$. Sehingga diperoleh bahwa *tax avoidance* tidak mampu dipengaruhi oleh *debt policy* dengan signifikan.

Uji f

Hasil dari uji

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.296	2	99.148	.988	.419 ^b
	Residual	702.154	7	100.308		
	Total	900.450	9			

a. Dependent Variabel: *Tax Avoidance*

b. Predictors: (Cosntant), *Asset Intensity*, *Debt Policy*

Sumber: *Output SPSS versi 22*

Menyinggung hasil ts terukur yang dicatat dalam tabel diatas, hasil pengukuran f adalah 0,988 dengan signifikansi 0,419 dimana

nilai ini lebih penting daripada 0,05. Dengan cara ini, hasil yang diperoleh bahwa *asset intensity* dan *debt policy* pada saat yang sama

tidak memiliki dampak besar pada *tax avoidance*.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Asset Intensity terhadap Tax Avoidance pada PT. Bukit Asam, Tbk periode 2011-2020

Asset intensity berhubungan erat dengan proporsi pendanaan yang dimiliki perusahaan dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga mencerminkan perputaran dana dari kegiatan perusahaan. Struktur aktiva akan berdampak pada besarnya tarif efektif pajak, hal ini dapat berkurang karena adanya *depreciation cost* aktiva tetap pertahun. Perusahaan biasanya memiliki aktiva tetap cukup tinggi sehingga memiliki tarif efektif pajak lebih kecil karena penyusutan *include* akan menurunkan biaya pajak (Putri, 2020).

Efek samping dari pemeriksaan menunjukkan bahwa *asset intensity* memiliki dampak penting pada *tax avoidance*. Hasil uji faktual diperoleh nilai t sebesar $-0,113$ dengan $\text{sig } 0,913 > 0,05$. Selanjutnya, hipotesis di atas tidak sesuai dengan hasil penelitian.

Asset intensity tidak memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Aktiva tetap tidak memiliki dampak besar terhadap melaksanakan aktivitas pajak yang agresif. Aktiva tetap dalam perusahaan fokus digunakan untuk keperluan operasional perusahaan, tidak fiks digunakan sebagai komposisi untuk mengelakan pajak. Maka walaupun perusahaan memiliki aktiva tetap yang tinggi tidak mampu merubah keagesifan perusahaan.

Usia ekonomis asset tetap perusahaan berbeda-beda jika dilihat dari sudut perpajakan Indonesia. Masing-masing memiliki umur ekonomi dan beban depresiasi yang

berbeda-beda. Penyimpanan asset tetap dilakukan oleh perusahaan bukan hanya untuk mengurangi pajak namun bertujuan untuk memperlancar operasional perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2020) dan Ningsih dkk (2020) menerangkan bahwa *asset intensity* tidak mampu mempengaruhi *tax avoidance* dengan signifikan.

Pengaruh Debt Policy terhadap Tax Avoidance pada PT. Bukit Asam, Tbk periode 2011-2020

Det policy merupakan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan dari hutang. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan pendanaan (Mradiyanti et al., 2020). Hal ini menyangkut mengenai keputusan perusahaan untuk menentukan komposisi dana yang akan digunakan (Husnan & Pujiastuti, 2012).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa *debt policy* tidak berdampak besar terhadap *tax avoidance*. Hasil uji faktual diperoleh t hitung sebesar $-1,137$ dengan $\text{sig } 0,229 > 0,05$. Dengan cara ini, hipotesis di atas tidak sesuai dengan konsekuensi penyelidikan.

Penemuan penelitian ini sesuai dengan teori *trade off*, dimana organisasi penukar pengurangan pajak dari pembiayaan kewajiban dengan potensi masalah likuidasi (Umdiana & Claudia, 2020). Keputusan pendanaan perusahaan yang mampu mengurangi penghindaran pajak berkaitan dengan tarif pajak efektif karena terdapat peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini menggunakan pinjaman dari pinjaman ekuitas kepada pemegang saham, sehingga beban bunga atas hutang tersebut

tidak bisa menjadi laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat mengurangi keuntungan berasal dari pemberi pinjaman yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan atau dapat disebut pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 18 ayat (1) dan (3) (Gupta & Newberry, 1997).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Noor dkk (2010) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) bahwa *debt policy* tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Asset Intensity* dan *Debt Policy* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Bukit Asam, Tbk periode 2011-2020

Tax avoidance merupakan salah satu upaya manajemen untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak ini umum digunakan oleh perusahaan besar didunia. Metode ini legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya metode ini perusahaan mengharapkan nilai perusahaan kembali meningkat, yaitu dengan menurunnya tingkat pembayaran pajak (Juliarta Nugraha & Ery Setiawan, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *asset intensity* dan *debt policy* secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan nilai *f-test* sebesar 0,988 dengan signifikansi 0,419 yang mana signifikansi ini lebih besar dari 0,05.

Pada dasarnya harta benda, pabrik dan peralatan yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Jarang sekali ada perusahaan yang menggunakan aset tetap untuk dijual demi menutupi kebutuhan pendanaan. Serta kebijakan hutang yang ditentukan oleh perusahaan sering dilakukn meminjam kepada para pemodal yaitu investor. Hasil penelitian ini tidak signifikan disebabkan juga dari jumlah data yang teliti, sehingga struktur data ini memungkinkan hasil yang tidak signifikan.

SIMPULAN

Pada bagian akhir penelitian memiliki tiga kesimpulan. Pertama, *asset intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* . Kedua, *debt policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ketiga, *asset intensity* dan *debt policy* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dengan kontribusi sebesar 22%. Implikasi pada penelitian ini, tidak semua perusahaan akan memanfaatkan total aktiva tetap merupakan upaya pengurang pajak karena aset tetap mengandung nilai penyusutan. Serta kebijakan hutang tidak selalu mengandalkan sumber dana dari kreditur. Perusahaan yang menjadi objek penelitian lebih mengandalkan pendanaan dari pemodal yang memiliki hubungan istimewa yaitu investor. Sehingga hal ini menyebabkan kedua variabel berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisamartha, I. B. F., & Noviari, A. N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(3), 973–1000.
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2016). Tax Avoidance : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307.
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage dan Firm Size terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238.
- Blocher, E., KH, C., J, C., & TW, L. (2007). *Manajemen Biaya. Tim Terjemahan dari Cost Management*. Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2007). *Essentials of Financial Management : Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemah oleh Ali Akbar Yulianto*. Salemba Empat.
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 368–379.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–160.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463>
- Dyreng, S. D. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of Variability in Corporate Tax Rate : Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Publicity*, 16(1), 1–34.
- Hanafi, M. (2010). *Manajemen Keuangan. Edisi Pertama*. BPFE.
- Harmono. (2009). *Manajemen Keuangan*. PT. Bumi Aksara.
- Haryadi, T. (2012). Pengaruh Intensitas Modal, Return On Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan di BEI. *Jurnal Universitas Negeri Riau*.
- Husnan, S., & Pujiastuti, E. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. UPP STIM YPKN.

- Jama, A. K., & Harnovinsah, H. (2018). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Keputusan Pelaporan Keuangan Dan Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 15–33. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2594>
- Juliartha Nugraha, M. C., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 398. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p15>
- Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. PT Elex Media Komputindo.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mradiyanti, U., Ahmad, G. N., & Putri, R. (2020). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 1–17. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.30859>
- Mulyani, S., Darminto, & Endang, M. . (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur ang terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–9.
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi. *EkoPreneur*, 1(2), 245–256.
- Noor, R., NSM, F., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 1–12.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka.
- Prabowo, Y. (2006). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Grasindo.
- Purwanti, S. M., & Sugiarty, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Putri, V. R. (2020). Berpengaruhkah Asset Intensity dan Debt Policy Terhadap Penghindaran Pajak ? *Jurnal Akuntansi Keuangan Da Bisnis*, 13(2), 118–125.
- Riyanto, B. (2008). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Keempat*. BPFE.
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh dividen policy dan debt policy terhadap firm value yang dimoderasi oleh profitability. *Journal Of Business & Applied Management*, 12(1), 35–57.
- Savitri, D. A. M. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 8(2), 19–32.

- Subramanyam. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- Umdiana, N., & Claudia, H. (2020). Analisis Struktur Modal Berdasarkan Trade off Theory. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 52–70.
- Waluyo, T. ., Basri, Y. ., & Rusli. (2015). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Intitusi terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Sumtera Utara.
- Weygandt, J, J., Kieso, D. E., & Kamel, P. D. (2007). *Accounting Principles*. Salemba Empat.
- Zain. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi ke 3*. Salemba Empat.

